TAHUN INI DITARGET MULAI BEROPERASI

TPST dengan Insinerator Dibangun di Caturharjo

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman bakal membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) menggunakan mesin insinerator di Caturharjo Sleman. Ditargetkan tahun ini sudah bisa dioperasikan. Dengan dibangunnya TPST tersebut, harapannya permasalahan sampah di Sleman dapat teratasi dengan baik.

Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan, TPST dengan memanfaatkan mesin insinerator ini rencananya dibangun di atas tanah kas desa seluas 6 hektare di Caturharjo Sleman. Pemkab Sleman menggandeng pihak ketiga. "Untuk membangun TPST di Caturharjo ini membutuhkan anggaran Rp 200 miliar - Rp 225 miliar. Makanya kami akan menggandeng pihak ketiga untuk bekerja dalam mengatasi permasalahan sampah ini," ujarnya, Rabu (9/4).

Dalam pembangunan TPST ini, pihak kalurahan akan bekerja sama dengan pihak ketiga. Dimana pembelian alat dan lainnya akan dilakukan oleh pihak ketiga. Tinggal nanti pemda membayar per tonnya

KR-Saifullah Nur Ichwan

Harda Kiswaya

berapa ke pihak ketiga. "Jadi nanti tidak hanya mengolah sampah dari Pemda saja. Tapi juga dapat membantu mengolah sampah dari pihak swasta," paparnya.

Dengan mesin insinerator ini, lanjut Harda, akan bisa mengolah sampah 50 ton per jam. Sementara sampah di Sleman ini rata-rata 500 ton per hari. Padahal TPST itu direncanakan akan bekerja selama 24 jam. "Dengan insinerator ini, masalah sampah akan bisa dituntaskan karena bisa mengolah sampah 50 ton per jam. Bahkan TPST ini nantinya dapat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di wilayah lain seperti Kota Yogya," terangnya.

Dengan adanya TPST tersebut, Pemkab Sleman tidak perlu lagi menambah TPST di lainnya. Sedangkan TPST yang sudah beroperasi seperti di Kalasan dan Minggir untuk mendukung keberadaan TPST di Caturharjo. "Pada prinsipnya TPST di Kalasan dan Minggir untuk mendukung TPST di Caturharjo. Sedangkan yang menjadi keluhan warga tentang bau tak sedap, kami minta DLH mengevaluasi supaya tidak menimbulkan baru. Seperti pengangkutan sampah jangan sampai terlambat," pungkas Harda. **(Sni)-f**

RESPONS MASUKAN DAN KELUHAN MASYARAKAT

Bupati Evaluasi Program WiFi Gratis Padukuhan

SLEMAN (KR) - Bupati Sleman memastikan mengevaluasi program WiFi gratis yang menyasar seluruh padukuhan. Apalagi program prioritas Pemkab Sleman tersebut mendapat banyak keluhan dari masyarakat, utamanya terkait spesifikasi jangkauan jaringan yang dinilai sangat terbatas.

"Program WiFi padukuhan saat ini sedang dievaluasi. Kami mendapatkan masukan dari masyarakat terkait jangkauan jaringan yang terbatas. Jangkauan WiFi dikeluhkan masyarakat hanya di kisaran 20 meteran. Mukanya ini saya perlu evaluasi, benar atau tidak itu. Kalau benar ya, kita betul-betul kita perbaiki," kata Bupati Harda kepada pers, kemarin.

Diakui Bupati, program WiFi gratis tiap padukuhan, yang merupakan program prioritas pemerintahan sebelumnya sebenarnya baik. Tujuannya untuk menghadirkan akses internet gratis ke masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya diduga kurang sesuai harapan karena banyak masyarakat yang tidak puas.

"Oleh karena itu, kami melakukan evaluasi. Mengecek kebenaran keluhan dari masyarakat, sekaligus untuk menjamin mutu dan kualitas program. Sembari dilakukan evaluasi, pengadaan WiFi maupun bandwidth di Kominfo Sleman juga sementara dihentikan terlebih dahulu. Lelang dihentikan sebab kami membutuhkan hasil evaluasi untuk perbaikan program ke depan. Saya tidak mau program yang baik ini hanya sekadar jalan apa adanya," tandas Bupati.

Sementara itu, Plt Inspektur Kabupaten Sleman Taupiq Wahyudi kepada wartawan mengaku melakukan audit bandwidth di Kominfo Sleman ini sejak akhir tahun 2024. Diawali dari laporan yang mencuat dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti. Saat ini proses pemeriksaan terus berjalan, bahkan Inspektorat sudah mengecek ke lapangan dan meminta keterangan tenaga ahli.

"Namun sejauh ini belum ada laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) karena pemeriksaan baru mencapai 90 persen. Tahapan berikutnya, akan mengonfirmasi hasil pemeriksaan tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jadi nanti prosesnya kami akan konfirmasi ke OPD terkait. Pembelaannya bagaimana. Jika tidak bisa menjawab, ya berarti ada temuan," kata Taupiq.

Taupiq menargetkan audit bisa seratus persen selesai dalam waktu dekat, sehingga pasca lebaran ini, pihaknya akan mengundang OPD terkait untuk memberikan jawaban. Nantinya, secara kelembagaan dapat memberikan perincian siapa saja yang terlibat dalam proses pengadaan bandwidth tersebut. Misalnya, siapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan, maupun siapa kepala dinas yang bertanggungjawab saat pengadaan itu. **(Has)-f**

KONSEP PENATAAN RUANG

Sleman Dibagi dalam Empat Kawasan

SLEMAN (KR) - Konsep penataan ruang, secara umum wilayah Kabupaten Sleman dibagi menjadi empat kawasan. Pembagian kawasan ini sesuai karakter wilayah masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa usai menghadiri kegiatan reses Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di kantor DPD RI DIY Jalan Kusumanegara Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (9/4). Kegiatan yang juga dihadiri kepala daerah se-DIY ini membahas tentang inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dijelaskan Danang, untuk penataan kawasan Sleman timur ditekankan pada penataan pemukiman yang mendukung wisata peninggalan budaya sejarah. Kemudian Sleman barat difokuskan pada penataan pemukiman yang mendukung ketahanan pangan.

"Sedangkan untuk Sleman tengah ditekankan penataan pemukiman dan fasilitas yang mendukung kegiatan jasa pendidikan dan pariwisata. Terakhir, Sleman Utara ditekankan penataan pemukiman yang mendukung kegiatan wisata alam dengan tetap mempertimbangkan mitigasi bencana," beber Danang.

KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa saat menyampaikan pendapatnya terkait konsep penataan ruang di Sleman.

Sementara GKR Hemas menyebut penataan ruang bukan hanya permasalahan teknis. Namun juga menyangkut keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan kedaulatan ruang hidup masyarakat. Terlebih DIY memiliki kekhasan dalam penataan aspek tata ruang, baik aspek sosial, budaya, maupun status keistimewaan. "Maka dari itu, pengawasan terkait pelaksanaan undang-undang penataan ruang ini menjadi sangat krusial," ujarnya. **(Has)-f**

TINGKAT OKUPANSI HOTEL RENDAH

Sleman Sumbang 50 Pct Kunjungan Wisatawan DIY

SLEMAN (KR) - Pada libur lebaran 2025 ini, destinasi wisata di Sleman mampu meraup 525.874 kunjungan wisatawan. Sementara kunjungan wisatawan di DIY saat libur lebaran kemarin mencapai 1.021.335 kunjungan. Artinya, Sleman menyumbang sekitar 50 persen kunjungan wisatawan untuk DIY.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman Ishadi Zayid mengaku bersyukur di tengah ekonomi yang sulit, kunjungan wisatawan masih sesuai target yakni di angka 300.000 sampai 500.000. Salah satu destinasi yang banyak didatangi wisatawan adalah Kaliadem dengan rata-rata 10.000 kunjungan tiap harinya. Selain itu, Kaliurang dengan 4.000 kunjungan per hari. "Candi Prambanan itu total 108.000. Sementara puncak kunjungan wisatawan di Sleman pada tanggal 3 April," ungkapnya kepada pers di Setda Sleman, Rabu (9/4).

KR-Istimewa

Kadispar Ishadi Zayid.

Meski kunjungan wisatawan mencapai target, namun Zayid menyoroti rendahnya okupansi hotel yang hanya mencapai 35 persen. Artinya, kunjungan wisatawan memang banyak, tetapi yang menginap sedikit. "Belanja wisatawan itu Rp 1 juta sampai Rp 1,25 juta. Itu lebih untuk oleh-oleh dan kuliner," jelasnya.

Zayid juga mewaspadai kunjungan wisatawan ke depan. Hal itu terkait dengan larangan study tour dari beberapa daerah maupun dampak dari efisiensi. Kebijakan-kebijakan itu pasti akan berdampak pada sektor pariwisata.

"Namun kami akan tetap berupaya mempertahankan target kunjungan wisawatan dengan melakukan berbagai inovasi dan promosi. Yang tidak kalah oenting adalah berwisata di Sleman harus merasa aman, nyaman dan menyenangkan. Kalau itu bisa dimaksimalkan, kami optimis target kunjungan wisatawan di tahun 2025 bisa tercapai, bahkan melebih target," pungkas Zayid. **(Has)-f**

BOLOS USAI CUTI LEBARAN

BKPP Siapkan Sejumlah Sanksi

SLEMAN (KR) - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman mengingatkan, bakal ada sanksi tegas berupa pengurangan tambahan penghasilan bagi abdi negara yang kedapatan bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan usai cuti lebaran. Pemotongan tambahan penghasilan ini diatur dalam peraturan bupati (Perbup).

"Ya kalau tidak berangkat tentunya juga ada sanksi. Tidak berangkat tentunya pengurangan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Kalau tidak berangkat satu hari kan ada pengurangan TPP. Jadi ada potongan-potongan, misalnya bila pulang mendahului, datang terlambat, kemudian tidak berangkat," kata Kepala BKPP Kabupaten Sleman R Budi Pramono kepada wartawan, kemarin.

Disinggung jumlah ASN yang membolos di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran ini, Budi akan melakukan pemantauan dengan cara melihat record presensi maupun menunggu laporan resmi dari masing-masing OPD. "Kalau tahun sebelumnya ada yang bolos, tapi enggak banyak. Kita beri sanksi yang bolos tanpa keterangan," ujarnya.

Sementara Bupati Sleman Harda Kiswaya mengatakan sesuai aturan jika ASN melanggar memang terkena sanksi. Adapun terkait sanksi yang diberikan, jika bolos kerja setelah libur lebaran, belum begitu memahaminya, apakah bisa terkena pemotongan tambahan penghasilan atau tidak.

"Namun yang jelas, kami berkomitmen melakukan pemantauan dan menegakan aturan jika ada ASN yang melanggar. Jadi sesuai aturan saja, bisa ditegur dan sebagainya, dan minta jangan diulangi. Misalnya (apakah bisa) dipotong TPP atau belum, saya belum rigid memahaminya. Tapi berkaitan dengan punishmant akan kami ditegakkan," tandasnya. **(Has)-f**